

Tinjauan Buku:

STRATEGI BUTON MENGHADAPI ANCAMAN TERNATE, GOWA, DAN VOC

Oleh: Usman*



Judul Buku : Sejarah Buton yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana
Penulis : Susanto Zuhdi
Penerbit : PT. Rajagrafindo Pustaka
Cetakan : I, Juli 2010
Tebal : xli + 350 hlm.
ISBN : 978-979-769-229-2

Pendahuluan

Membaca buku ini seperti menyusuri aliran sungai yang jernih, karena bukan hanya sejarah Kerajaan Buton yang tampak jelas dan rinci, tetapi kerajaan-kerajaan lain seperti Ternate, Gowa, Bone, dan lainnya begitu nyata tergambar. Keinginan penulis untuk menjelaskan sejarah pulau-pulau yang terabaikan (*history of neglected islands*), termasuk Buton dan pulau-pulau lainnya, dapat terwujud dalam rangkaian tulisan yang sistematis dan gaya bahasa yang mengalir.

Nama Buton ditujukan pada empat pengertian: *pertama*, Buton merupakan nama untuk menyebut sebuah pulau; *kedua*, Buton adalah nama kerajaan atau kesultanan; *ketiga*, Buton ditujukan untuk menyebut nama sebuah kabupaten; dan *keempat*, Buton adalah nama untuk menyebut orang Buton. Nama Buton sebagai kerajaan diperkirakan telah berdiri sebelum Majapahit menyebutnya sebagai salah satu daerah "taklukannya."

Penulis menyebutkan bahwa nama Buton tercantum dalam *Negarakartagama* (1365). Empu Prapanca dalam *Negarakartagama* membagi daerah-daerah "taklukan" Majapahit menjadi empat

*Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha Lantai 6, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, E-mail: usmansyarani@yahoo.com

kelompok. *Pertama*, negeri "Melayu" meliputi tempat-tempat di Pulau Sumatera mulai dari Jambi dan Palembang sampai ke Samudera Lamori (di Aceh). *Kedua*, negeri di "Pulau Tanjung Negara" yang terletak di Pulau Kalimantan. *Ketiga*, tempat yang terdapat di Semenanjung Malaya, antara lain: Pahang, Langkasuka (di Patani), Kalantan dan Tringgano (Trengganu), serta Tumasik (Singapura). *Keempat*, tempat-tempat di sebelah timur Jawa mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian. Dalam kaitan dengan upeti dan kerajaan-kerajaan tetangga Majapahit di bagian "timur Jawa", diungkapkan adanya pulau-pulau Makassar, Buton-Banggawi, Kunir, Galiyao, Salaya, Sumba, Solor, Muar, Wandan, Ambawan, Moloko Wanin, Seran dan Timur (hal. 69).

Dalam perkembangan sistem pemerintahan sekarang, Buton adalah nama untuk sebuah kabupaten, bersama tiga kabupaten lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: Muna, Kendari, dan Kokala. Buton dan Muna merupakan dua kabupaten yang merupakan gugusan pulau. Sedangkan Kendari dan Kokala terletak di jazirah Pulau Sulawesi. Saat ini, hampir seluruh daerah Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara yang dibentuk pada tahun 1964 merupakan wilayah kekuasaan Buton. Batas wilayah provinsi ini di sebelah utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, di sebelah selatan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat dengan Teluk Bone. Provinsi yang mencakup daerah daratan (jazirah bagian tenggara Sulawesi) dan daerah kepulauan ini memiliki wilayah seluas kurang lebih 38.140 km², sedangkan wilayah perairan (laut) kira-kira luasnya adalah 110.000 km². Jadi, provinsi ini memiliki luas perairan tiga kali dari luas daratannya (hal. 39).

Berdirinya Kerajaan Buton

Kisah *Mia Patamiana* (Si Empat Orang) menjelaskan bahwa kerajaan Buton didirikan oleh empat orang, yaitu: Sipanjonga, Simalui, Sitanamajo, dan Sijawangkati. Selanjutnya dalam kisah itu disebutkan bahwa Sipanjonga menikah dengan Sabanang, saudara perempuan Simalui, dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Betoambari. Di samping itu, ada juga tradisi lokal yang menjelaskan adanya kisah seorang putri misterius yang dianggap turut menjadi pendiri kerajaan Buton. Dikisahkan bahwa putri itu muncul dari "buluh gading" dan bernama Wakaka. Bukan hanya seorang putri, tapi dalam kisah lain

disebutkan juga adanya tokoh misterius lain yang ditemukan dari jaring di sungai di Wakarumba. Tokoh itu seorang pemuda tampan yang dikenal dengan nama Sibatara. Wakaka adalah anak perempuan Batara Guru yang bermukim di langit, sedangkan Sibatara adalah cucu seorang raja dari Majapahit (hal. 73).

Batoambari mengawinkan Wakaka dengan Sibatara. Wakaka kemudian menjadi Raja Buton. Dari perkawinan itu lahir tujuh anak perempuan, yang tertua Bulawambona yang kawin dengan La Baluwu. Lalu, Wakaka bersama dengan enam anak perempuannya kembali ke langit. Anak laki-laki tertua dari pasangan Buluwambona dan La Baluwu bernama Bancapatola menurunkan Murhum yang kemudian menjadi Raja Buton. Pada masa pemerintahan Murhum inilah Islam masuk di kerajaan Buton. Perubahan Buton menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1542 M (948 H), bersamaan dengan pelantikan Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama, dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Sebutan sultan ditiru dari negeri-negeri Arab atau Timur Tengah untuk raja yang telah dikenal sebelumnya.

Salah satu unsur yang menentukan perkembangan dan bentuk karakteristik kerajaan dan masyarakat Buton adalah Islam. Pembicaraan paling banyak dan meluas mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara diarahkan pada perkiraan paling awal masuk di berbagai tempat, bagaimana dan dari mana asal usulnya. Bukannya hal itu tidak menarik, tetapi yang paling penting dicatat bahwa proses itu masih berlangsung terus dan belum selesai. Dalam proses itu pula dapat dipahami adanya pertemuan budaya setempat dengan Islam yang membuahkan aspek-aspek perkembangan di masyarakat yang bersangkutan.

Ada beberapa versi lokal mengenai masuknya Islam di Buton. *Pertama*, Islam masuk di Buton kira-kira tahun 1540. Tradisi lokal menyebut bahwa pembawa Islam ke Buton ialah Syeikh Abdul Wahid, putra Syeikh Sulaiman keturunan Arab yang beristri putri Sultan Johor. Sekembali dari Ternate melalui Adonara menuju Johar, Syeikh Abdul Wahid berpapasan dengan gurunya Imam Pasai yang bernama Ahmad bin Qois Al Aidrus di perairan Flores (dekat pulau Batuatas). Sang guru menugaskan muridnya untuk tidak segera kembali ke Johor melainkan terlebih dahulu menuju ke Utara, ke negeri Buton. Berbeloklah perahu yang ditumpangi Syeikh Abdul Wahid ke utara dan berlabuh di Burangasi, di Rampea bagian selatan pulau Buton. Kehadirannya menimbulkan kecurigaan penduduk sekitar pantai yang selalu bersiaga

menghadapi segala kemungkinan datangnya pasukan La Bolontio pemimpin bajak laut dari Tobelo. Untuk sementara waktu mereka tidak diperbolehkan mendarat. Versi kedua mengenai masuknya Islam ke Buton adalah pada tahun 1580 ketika Sultan Babullah dari Ternate memperluas kekuasaannya.

Dari kedua versi di atas, orang Buton cenderung menetapkan yang pertama, bahwa Islam masuk pada tahun 1540, tidak langsung dari Ternate tetapi dari Solor. Sepertinya ada semacam bentuk "pengingkaran" atas dominasi kultural dan politik Ternate dikaitkan dengan pengaruh terhadap tafsir masuknya Islam ke Buton. Sumber tradisional Buton memperlihatkan kesan itu. Dominasi kultural dan politik Ternate atas Buton merupakan kendala struktural yang sulit ditepis. Oleh karena itu, dapat dimengerti begitu kuatnya keinginan Buton untuk berdiri sejajar dengan Ternate (hal. 103-104).

Buton: "Perahu Bercadik Ganda"

Di dalam tradisi lokal Buton ada pernyataan bahwa kerajaan Buton digambarkan seperti bentuk "perahu." Dalam posisinya sebagai "perahu," Buton tentu saja memiliki bagian yang disebut haluan dan buritan. Dalam tradisi lokal *Ajonga*, dikatakan bahwa posisi buritan (*wana*) "perahu" Buton berada di sebelah timur, sedangkan bagian haluan (*rope*) berada di barat. Dari kedua arah itu, "perahu" Buton selalu menghadapi ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu datang dari timur dan Barat.

Ancaman dari arah "buritan" maupun "haluan", sebagaimana digambarkan dalam tradisi lokal, mencerminkan analogi "negara" Buton dengan sebuah "perahu" (*the ship of state*). *The Ship of Buton* dalam penerapannya adalah *barata*, perahu bercadik ganda. Dalam konteks ini dapat dipahami munculnya gagasan bahwa konsepsi mengenai kerajaan Buton diambil struktur perahu. Perahu dianggap dapat membawa seluruh penumpang warga negara berlayar menuju cita-cita yang diharapkan. Layaknya sebuah perahu, ia mempunyai keseimbangan sehingga tidak mudah goyang apalagi sampai terbalik. Konsepsi perahu yang dibayangkan oleh kerajaan Buton adalah perahu bercadik ganda, yang mempunyai dua sayap di kanan dan dua sayap di kiri. Pada setiap pertemuan sayap dan pengapitnya ada ikatan yang berfungsi sebagai penguat. Keempat penguat itu disebut *barata*. Dalam bahasa Wolio, *barata* selain berarti "tenaga" atau "kekuatan" juga berarti ikatan pasak

pengapung sayap perahu dengan tangannya. *Barata* yang dimaksud penopang kesultanan Buton adalah Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa (hal. 120).

Hal yang umum dalam masyarakat maritim adalah bahwa perahu sering dijadikan simbol, kiasan, dan sejenisnya untuk mengungkapkan atau merumuskan sesuatu kehendak, harapan, atau bahkan suatu cita-cita. Masyarakat di kepulauan Pasifik seperti halnya di kepulauan di Asia Tenggara sering menggunakan metafora yang berhubungan dengan bentuk perahu, untuk menggambarkan organisasi sosial yang menggambarkan sebuah jaringan interaksi di dalam kesatuan yang saling bergantung dan saling mengisi. Bangun perahu juga dapat dilihat sebagai suatu himpunan struktur kompleks dari sejumlah unsur sederhana. Hasil akhir pembuatan perahu merupakan simbol dari pencapaian kelompok dan sekaligus memperkuat kelompok solidaritas itu.

Keempat *barata* itu berkewajiban melindungi kerajaan dari serangan musuh yang datang dari luar. Kulisusu dan Kaledupa berkewajiban menjaga serangan musuh dari arah timur. Sementara itu, Tiworo dan Muna menjaga keamanan kerajaan dari arah barat. Kedudukan keempat *barata* itu juga merupakan *vasal* atau daerah taklukan yang memberikan keuntungan atau *wingewest* bagi Buton (hal. 121).

Menghadapi Ekspansi Ternate

Pada tahun 1576, Babullah mengirim Rubohongi dari keluarga *tomagola* ke Hoamoal, Buru, Manipa, Ambelau, Kelang, dan Boanda dengan tujuan memasukkan daerah-daerah itu ke dalam wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1850, Sultan Babullah bersama dengan Calapaya menganeksasi wilayah Tobungku, Tiworo, dan Wolio (Buton), Ambon, Selayar, dan kerajaan-kerajaan di pantai timur dan utara Sulawesi, serta di bagian selatan Mindanao dan menyebarluaskan agama Islam ke wilayah-wilayah itu. Sejak itu, tampaknya kedudukan Buton berada di "bawah" atau setidaknya dalam "pengaruh" Ternate.

Ternate yang ekspansif menjadi ancaman Buton yang selalu harus "pandai-pandai" memelihara hubungan terutama dengan kerajaan yang lebih kuat itu. Dilihat dari bentuk hubungan antar kerajaan di Nusantara, Buton memperlihatkan kedudukan di bawah Ternate. Sumber Belanda mencatat kedudukan Ternate yang lebih tinggi itu

karena ia menerima pemberian dari Buton (upeti). Sedangkan dilihat dari segi lain tentang kedaulatan, Buton mempunyai masalah kekuasaan teritorial dengan Ternate. Hal ini terbukti dengan dianeksasinya beberapa wilayah kekuasaan Buton menjadi wilayah kekuasaan Ternate.

Hubungan Buton dengan Ternate tidak saja hanya di antara sultan saja, tetapi juga pada tataran elite pemerintah dan seperti itu lebih banyak lagi pada tataran yang lebih rendah, yakni anggota kelompok-kelompok masyarakatnya. Orang Buton banyak berpindah dan menetap di wilayah-wilayah pesisir, terutama di bagian timur Nusantara. Aktivitas mereka berkisar pada usaha mencari hasil laut, jasa angkut, dan memperdagangkannya. Meskipun di satu pihak bagi Buton, Ternate adalah seteru, tetapi di lain pihak kerajaan kuat di Maluku itu menjadi "kakak" yang sewaktu-waktu dapat dimintakan "bantuannya." Hal ini terjadi ketika Buton menghadapi persoalan dengan kerajaan *vasalnya* (*barata*) Kalisusu dan desa Kumbaweha yang sering memperlihatkan oposisi, Sultan Buton pun mengajukan permohonan bantuannya (hal. 118).

Menangkis Serangan Gowa

Tampaknya Gowa menilai penting tidak hanya letak geografis Buton yang strategis dalam kerangka pelayaran ke Maluku, tetapi juga sebagai sumber tenaga manusianya. Persaingan antara Gowa dan VOC dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur telah melibatkan Buton ke dalam persetujuan mereka. Persaingan Gowa dan Ternate untuk memperebutkan daerah-daerah di kawasan timur juga telah menyeret Buton ke dalam konflik tersebut.

Tekanan dan ancaman Gowa terhadap Buton menyebabkan Buton bersekutu dengan VOC. Dengan hancurnya perjanjian Gowa dan Ternate (1607), Gowa sendirilah yang menghadapi VOC, yang bersekutu dengan Buton dan Ternate. Bagi Gowa, hal itu tidak menyebabkan berhentinya ekspansi ke wilayah-wilayah Timur. Itu terbukti ketika pada tahun 1617, 1619, dan 1621 Gowa mengirimkan pasukannya untuk menguasai Bima, Sumbawa, dan Taliwang. Selain itu, pasukan Gowa juga melakukan ekspansi kekuasaannya ke kepulauan Banggai dan Sula yang dianggap merupakan wilayah kekuasaan Ternate.

Pada tahun 1626 Gowa melakukan penyerangan ke Buton. Tepat pada tahun yang sama Buton sedang mengalami masalah

perebutan kekuasaan di kalangan elite. Meskipun buton berusaha keras mempertahankan persekutuannya dengan VOC, Buton tidak banyak mendapatkan bantuan dari VOC dalam menghadapi serangan Gowa tersebut. 152. Serangan Gowa berikutnya dipimpin sendiri oleh rajanya, Mangarangi Alauddin Tumenangari Gaukanna dan disertai para pembesarnya, serta Raha Tallo Maliengkaang Daeng-Manjonri Karaeng-Matowaya. Serangan untuk menaklukkan daerah Buton, dilakukan lagi pada tahun 1634 sebanyak dua kali. Ternyata blokade VOC tidak mampu menghalangi pasukan Makassar menggempur Buton.

Usaha yang tiada hentinya untuk menguasai dan memasukkan wilayah Buton ke dalam kekuasaan Gowa mengakibatkan seputuh penduduk Buton melarikan diri ke tempat lebih aman yang dapat mereka capai. Dilihat dari persaingannya dengan Ternate, usaha Gowa untuk menaklukkan Buton tidak terwujud karena sampai waktu itu Buton masih di bawah penguasaan Ternate. Hanya daerah Tiworo yang berhasil diduduki orang Makassar, hal itu diketahui kemudian pada tahun 1643 setelah Bone ditaklukkan Gowa (hal. 153).

Gowa menganggap ada dua kesalahan Buton yang mendorong Gowa melakukan penyerangan. *Pertama*, Buton telah memihak kepada VOC dan *kedua*, Buton telah menerima pengungsian Arung Palakka. 172 Karena itu, ancaman utama Buton adalah Gowa. Gowa yang ekspansif secara politik maupun ekonomis dengan cara merampas orang, merupakan ancaman yang menakutkan bagi Buton. Buton tidak mampu melawan sendiri kekuatan Gowa. Alasan Bone untuk tidak mengajak Buton dalam menghadapi Gowa, Buton dinilai merupakan kerajaan kecil dan lemah. Di tengah konstalasi kekuatan-kekuatan besar, Buton dapat memanfaatkan satu atau dua di antara mereka untuk membantunya terutama dalam menghadapi serangan Gowa. Ada beberapa upaya Buton dalam menghadapi lawan-lawannya, yakni membangun benteng kraton di masa pemerintahan Sultan La Buke, pembuatan benteng telah banyak menghabiskan tenaga manusia dan biaya. Buton harus membayar upeti yang ditetapkan Gowa setelah perang pada tahun 1665. Akibatnya Sultan La Awu menetapkan berbagai cara menarik pajak yang memberatkan rakyat (hal. 180).

Bekerja Sama dengan VOC

Tidak seperti dalam hubungan antara Buton dengan Gowa dan Ternate yang terbentuk dengan konsep ancaman haluan-buritan,

hubungan Buton dengan VOC berciri lain. Secara struktural VOC adalah kongsi dagang yang menjalankan kapitalisme dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya. VOC memerlukan Buton bukan hanya faktor geografik dan politik, tetapi juga keuntungan ekonomi. Di pihak lain keterancaman Buton oleh serangan militer Gowa, mendorongnya melakukan persekutuan militer dengan VOC.

Ada beberapa faktor yang menentukan terbentuknya pola persekutuan militer Buton-VOC. *Pertama*, ancaman dan tekanan Gowa terhadap Buton. *Kedua*, faktor VOC sebagai pendukung legitimasi Buton terhadap vassal-vassalnya, khususnya Muna. *Ketiga*, obsesi Sultan Dayanu Ikhsanuddin (m. 1578-1615), di samping menginginkan Buton yang aman dan merdeka, juga agar jabatan sultan berada di garis keturunannya, keluarga Tanailandu. Bentuk formalitas persekutuan militer Buton dan VOC adalah kontrak yang mereka tandatangi bersama.

Awal dari persentuhan politik antara Buton dan VOC dimulai pada tahun 1613. Berdasarkan *resolutie* Gubernur Jenderal VOC November 1612 ditetapkan penugasan kepada Appolonius Schotte, Kapten Makian, dan anggota Dewan Hindia (*Road van Indie*) untuk membuat kontrak persekutuan dengan Buton. Pada 5 Januari 1613 dilakukanlah penandatanganan kontrak yang pertama antara kesultanan Buton, dilakukan oleh Sultan La Elangi dengan VOC dilakukan oleh Appolonius Schotte (hal. 186).

Secara keseluruhan isi kontrak itu merupakan konsensi yang tidak seimbang dalam hubungan kepentingan antara kerajaan Buton dan VOC. VOC lebih untung dibandingkan dengan apa yang diperoleh Buton dari VOC. Bagi Buton, tampaknya bukan konsensi materi yang penting, melainkan memperoleh jaminan perlindungan keamanan dari VOC untuk menghadapi bangsa-bangsa asing dan kerajaan Gowa, itulah yang paling hakiki. Yang lain adalah soal kebiasaan, dalam hal menjalankan ajaran agama, dan janji VOC untuk tidak mencampuri urusan pemerintahan. Sebaliknya, VOC memperoleh bantuan dari Buton, dalam menghadapi semua musuhnya; memperoleh bantuan pelayaran ke Solor untuk mengusir Portugis; mendapat jaminan bahwa Buton melarang bangsa asing berdagang di Buton; berhak menentukan harga barang perdagangan dan kebutuhan hidup; memperoleh pembebasan pajak dan mendapat izin berdagang di seluruh wilayah Buton; berhak memasok beras dari Maluku; dapat melakukan

perkawinan dengan perempuan setempat dan menjadi pemeluk Kristen; boleh membeli budak dengan ketentuan, jika budak itu melarikan diri harus dikembalikan kepadanya; serta mendapat jaminan bahwa semua orang Buton yang terlibat dalam perang di Banda melawan VOC, ditarik pulang.

Perwujudan bentuk perlindungan VOC terhadap keamanan Buton dimulai ketika Schotte menugaskan *opperkoompan* Jacob van der Meyden, bersama sepuluh serdadu untuk mengerjakan dua benteng. Pekerjaan itu tidak menemui kesulitan karena kayu blok yang kuat dan besi sebagai bahannya, mudah diperoleh (hal. 189).

Kontrak-kontrak Buton dengan VOC tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Namun demikian, ada penjelasan yang cukup rinci mengenai kontrak kelima antara Buton dan VOC. Kontrak ini ditandatangani setelah Gowa mengalami kekalahan melawan VOC. Kontrak yang ditandatangani oleh Speelman dan La Simbata ini berbunyi bahwa di seluruh Kepulauan Tukang Besi, khususnya di Kaledupa, dan Wangi-wangi, semua pohon cengkeh, dan pala harus ditebang dan dimusnahkan. Sebaliknya, Sultan Buton memperoleh pembayaran ganti rugi sebesar 100 *ringgit*. Dalam urutan kontrak yang telah ditandatangani oleh Buton dan VOC, perjanjian ini disebut "*janji limaanguna*" atau "perjanjian yang kelima."

Pola sekutu dan pola seteru dapat juga bernuansa tumpang tindih. Titik tolaknya adalah cara bagaimana kedua belah pihak melihat kontrak sebagai perwujudan dari kepentingan masing-masing. Bagi Buton, kontrak dapat dilihat sebagai suatu "pusaka adat" yang harus dipelihara, tetapi juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang merugikan. Bagi VOC, kontrak merupakan sarana agar lebih luas untuk memasuki kehidupan politik internal Buton (hal. 199).

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pola sekutu seteru Buton-VOC ditentukan faktor eksternal: Gowa, Ternate, dan faktor internal yaitu Muna. Karena ancaman Gowa, Buton bersekutu dengan VOC. Karena pengaruh Gowa pula, kelompok prokontra VIC di dalam kekuasaan Buton bergerak dinamis, kadangkala yang satu lebih dominan daripada yang lain, begitu juga sebaliknya. Hal itu tergantung pada kondisi struktural maupun peran aktor yang menjadi "*prime-mover*" terjadinya peristiwa. Demikian pula dengan faktor Ternate, kadangkala ia menjadi sekutu, tetapi tidak jarang pula menjadi seteru.

Sultan-sultan Buton memperoleh dukungan VOC berupa legitimasi kekuasaan tunggal sehingga mampu mengendalikan kerajaan-kerajaan vasalnya yang disebut *barata*: Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa. Di antara keempat *barata* tersebut hanya Muna yang paling kuat. Meskipun pada dasarnya kedudukan Muna "di bawah", ia merasa sejajar dengan Buton. Itulah sebabnya, adakalanya Muna mencari kesempatan untuk melepaskan diri. Dengan dukungan VOC, Buton dapat memiliki kembali Muna dari persengketaan Gowa dan Ternate.

Dalam usaha untuk menerangkan gejala yang terkait dalam pola hubungan sekutu dan seteru, Buton-VOC, tampaknya relevan dengan menggunakan "dunia pandang" masing-masing pihak. Dilihat dari titik tolak baik Buton maupun VOC, keduanya mengacu pada "dunia pandang" masing-masing. Konsep "menyalahkan diri sendiri" yang diakui Buton sebagai akibat dari serangan Kumpeni, itu karena penguasa Buton menganggap dirinya sebagai "anak" berhadapan dengan "ayah" (VOC). Seorang ayah, tentu dalam arti yang baik, tidak pernah akan benar-benar marah kepada anaknya, kecuali untuk mengenakan hukuman. Konsepsi ini muncul dalam abad ke-19, ketika Belanda telah menjadi kekuatan yang mendominasi kehidupan politik. Seperti disebut di atas, sumber lokal yang ditulis dalam masa itu juga lebih berfungsi sebagai alat pembenaran saja, atau sebagai bantal kebudayaan (*cultural pillow*) meminjam istilah Taufik Abdullah. (hal. 226).

Simpulan

Penulis menyimpulkan bahwa Keberadaan Buton di tengah kedaulatan-kedaulatan besar Gowa, Ternate, dan VOC menyebabkan dirinya harus memilih secara bergantian antara sekutu dan seteru. Adanya ancaman Gowa mendorong Buton bersekutu dengan VOC, pihak yang juga berlawanan kepentingan dengan Gowa. Dalam menghadapi Gowa itu pula, Buton, VOC, dan Ternate secara bersama-sama menggalang kekuatan mereka. Bahkan untuk menghadapi Gowa itu pula, Buton bersekutu dengan Bone, kerajaan yang berusaha lepas dari tekanan Gowa.

Dalam hubungan Buton dengan Gowa tampaknya lebih merupakan soal perluasan kekuasaan dan ekonomi. Bagi Gowa, Buton harus dikuasai atau setidaknya dipengaruhi agar dapat memudahkan orang Makassar berlayar ke Kepulauan Maluku. Beberapa kali pasukan

Gowa menyerang Buton dan mengambil "upeti", serta merampas penduduknya. Bagi Buton, Gowa adalah ancaman yang datang dari arah haluan (*rope*).

Dalam hubungannya dengan Ternate, Buton menempatkan dirinya secara politik dan kultural berada di bawah Ternate. Meskipun selalu ada upaya Buton untuk berdiri sejajar dengan Ternate, tetapi setiap kali hal itu dilakukan setiap kali itu pula ia harus mengakui hegemoni kultural Ternate. Hal ini berkaitan dengan latar belakang mitos "dunia Maluku" dan masuknya Islam ke Buton dari Ternate. Meskipun demikian, dalam kenyataan politik, Buton mencoba beberapa kali menantang Ternate untuk mempertahankan daerahnya dari aneksasi dan perampasan warganya oleh Ternate. Bagi Buton, Ternate merupakan ancaman yang datang dari arah buritan (*wana*).

Di antara dua ancaman di atas, VOC merupakan bentuk ancaman yang lain dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pola hubungan Buton dengan VOC terlihat dalam kontrak pertama pada tahun 1613, yang menunjukkan bentuk aliansi militer. Pola hubungan berikutnya tercermin dalam kontrak tahun 1667, yang memperlihatkan penegasan kekuasaan tunggal Sultan Buton terutama untuk menghadapi perebutan kekuasaan dari para bangsawan dan tindakan membangkang dari para *barata*. Dalam kerangka itu VOC berkepentingan mempraktikkan kapitalisme, prinsip yang harus dijalankan oleh suatu kongsi dagang. Kepentingan ekonomi VOC terlihat dalam perolehan budak, *hongie tochten* dan upaya untuk menghancurkan "bajak laut" dan "penyelundupan."

Daftar Pustaka

- M.C. Riclefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hadara, Ali. 2006. *Dinamika Pelayaran Tradisional Orang Buton Kepulauan Tukang Besi*. Makalah pada Konferensi Nasional Sejarah VII.
- La Malihu. 1996. *Buton dan Tradisi Maritim: Suatu Kajian Sejarah Tentang Pelayaran Tradisional di Buton Timur (1957-1995)*, Ringkasan Hasil Penelitian. Jakarta: Program Studi Ilmu Sejarah, PPs UI.

Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta:
Jambatan-Perwakilan KITLV.